
Analisis Implementasi Asean Defense Industry Collaboration (ADIC) dan Ketergantungan Impor Senjata Negara Anggota: Tinjauan Per Negara.

Aditya Haryo Wahyudi

Program Studi Pascasarjana Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

aditya.haryo91@ui.ac.id

Informasi artikel

Kata kunci:

Industri pertahanan;
Ketergantungan;
ADIC;
Asia Tenggara

ABSTRAK

Dalam upayanya untuk memajukan industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) membentuk suatu kerangka kerja sama yang disebut sebagai ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM). ADIC dibentuk untuk membentuk suatu platform alat pertahanan ataupun persenjataan yang dapat digunakan secara bersama dengan biaya yang cukup rendah. Negara-negara Asia Tenggara yang terlibat di dalam ADIC pun merupakan negara yang memiliki kapabilitas militer dan industri pertahanan yang cukup mumpuni di kawasan. Walaupun demikian, hingga saat ini ADIC belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penelitian ini dilakukan setelah melihat perkembangan signifikan dari kerja sama serupa yang sudah lebih dahulu berdiri di Eropa, yaitu kerja sama konsorsium Eurofighter. Tulisan ini bermaksud untuk meninjau mengenai ketergantungan negara-negara anggota ADIC dalam melakukan importasi persenjataan kepada negara-negara besar di luar kawasan, melalui metode penelitian kualitatif dan kerangka analisis Arms Transfer Dependence dari David Kinsella. Penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan dari masing-masing negara anggota ADIC untuk bergantung kepada major powers di luar kawasan dalam memperkuat pertahanannya dalam melakukan pembelian persenjataan berat.

Keywords:

Defense Industry; Dependency;
ADIC;
Southeast Asia

ABSTRACT

In its efforts to advance the defense industry in the Southeast Asian region, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) forms a framework for cooperation known as the ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). This collaboration is part of the ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) forum cooperation. ADIC was formed to form a platform for defense equipment or weapons that can be used together at a fairly low cost. Southeast Asian countries that are involved in ADIC are also countries that have sufficient military and defense industrial capabilities in the region. However, until now ADIC has not shown any significant progress. This research was carried out after seeing the significant development of a similar cooperation that was already established in Europe, namely the Eurofighter consortium cooperation. This paper intends to review the dependence of ADIC member countries in importing weapons to large countries outside the region, through qualitative research methods and David Kinsella's Arms Transfer Dependence analysis framework. This research shows the tendency of each

ADIC member country to depend on major powers outside the region to strengthen their defenses in purchasing heavy weapons

Pendahuluan

Sejak berdirinya organisasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967, berbagai kerangka kerja sama telah dibentuk untuk meningkatkan integrasi di kawasan. Upaya-upaya tersebut walaupun dihadapi oleh berbagai macam tantangan dan hambatan, tetap terus dijalankan untuk memajukan kawasan Asia Tenggara. Upaya ASEAN untuk memajukan kawasannya dari segi keamanan dapat dilihat dari dibentuknya pertemuan Menteri Pertahanan antar negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut kemudian dikenal sebagai *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM), yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006.¹ Hingga saat ini, pertemuan ADMM terus dilakukan setiap tahunnya untuk membahas berbagai topik keamanan di kawasan Asia Tenggara, salah satunya terkait perdagangan senjata dan industri pertahanan negara-negara anggotanya.

Pembahasan mengenai industri pertahanan dan transfer senjata dari masing-masing negara anggota ASEAN di dalam forum ADMM mendorong adanya upaya untuk melakukan suatu kerja sama produksi bersama. Hal tersebut mendorong dibentuknya sebuah kerangka kerja sama yang dapat memfasilitasi pembentukan suatu platform persenjataan dan alat pertahanan bersama. Kerangka kerja sama tersebut adalah *ASEAN Defence Industry Collaboration* (ADIC). ADIC pertama kali dicanangkan pembentukannya pada pertemuan ADMM ke-4 di Hanoi pada tanggal 11 Mei 2010.² ADIC kemudian diresmikan pada pertemuan ADMM ke-5 pada tanggal 19 Mei 2011.

Dalam praktiknya, ADIC sejak

pembentukannya belum banyak mengalami kemajuan dalam membentuk suatu platform persenjataan dan alat pertahanan bersama. Negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki industri pertahanan yang cukup pesat di kawasan masih belum melakukan terobosan-terobosan bersama yang baru. Hingga saat ini, negara-negara anggota ASEAN masih terus melakukan modernisasi militernya dengan cara membeli dari negara-negara luar kawasan yang sudah maju. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan ADIC itu sendiri, yaitu untuk melakukan pengurangan impor persenjataan dan alat pertahanan lainnya dari luar kawasan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mencoba untuk membatasi pada pertanyaan: "Mengapa negara-negara Asia Tenggara anggota ADIC tetap melakukan impor alat pertahanan kepada negara-negara maju dan tidak melakukan produksi bersama?". Penelitian ini dilakukan setelah melihat fenomena unik setelah dibentuknya suatu institusi untuk melakukan produksi bersama tersebut. Pertanyaan penelitian ini ditarik dari fenomena-fenomena yang bisa dikatakan bertentangan. Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN yang terlibat di dalam kerangka kerja sama ADIC memiliki visi untuk memiliki suatu platform persenjataan atau alat pertahanan yang dapat dimiliki bersama. Platform tersebut nantinya dapat digunakan di kawasan dengan mudah, dan diharapkan untuk dapat diproduksi bersama. Pada kenyataannya negara-negara yang terlibat di dalam kerangka kerja sama ADIC masih tetap melakukan impor senjata dan alat pertahanan lainnya. Hal tersebut membuat kerangka kerja sama ADIC yang

sudah terbentuk menjadi terhambat dan kemajuannya menjadi sangat lambat.

Selain itu, penelitian ini dilakukan setelah melihat adanya bentuk kerja sama serupa yang lebih dahulu terbentuk di negara-negara anggota Uni Eropa melalui program Eurofighter Typhoon dan *European Defence Agency* (EDA). Program Eurofighter Typhoon sendiri merupakan suatu konsorsium Uni Eropa yang beranggotakan Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol untuk melakukan produksi bersama pesawat tempurnya.³ Keberhasilan dari kolaborasi yang dilakukan oleh Eurofighter tersebut menjadi model utama dari pembentukan ADIC oleh ASEAN.⁴

Kajian terdahulu terkait dengan industri persenjataan di kawasan Asia Tenggara, terutama bagi negara-negara anggota ASEAN terdiri dari berbagai macam paradigma yang menjadi kategorisasi tersendiri. Kategori pertama merupakan paradigma Realisme yang argumen utamanya adalah sikap negara-negara anggota ASEAN untuk tetap melakukan pengadaan, modernisasi militer dan alat persenjataan yang bersifat “self-reliance” atau “self-sufficient” dapat memicu terjadinya sebuah kondisi “security dilemma”. Negara-negara anggota ASEAN terlihat saling meningkatkan kapabilitas militernya, dengan melakukan pembelian senjata terbaru, serta melakukan modernisasi senjata yang sudah dimiliki. Hal tersebut dapat memicu terjadinya sebuah kondisi *security dilemma* diantara sesama negara anggota ASEAN (Singh, 1993; Bitzinger, 2010). Selain itu walaupun negara-negara seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengandalkan industri pertahanan domestik dalam rangka “self-reliant”, pada kenyataannya masih harus ada pengembangan lebih lanjut di dalam industri

pertahanannya (Simon, 1992; Bitzinger, 2013; Bitzinger, 2004). Adanya perlombaan senjata mempengaruhi bagaimana masing-masing negara di kawasan meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya (Huxley, 1994; Schofield, 1998; Wang, 2013)

Kategorisasi kedua terkait dengan perspektif Liberalisme dalam dunia internasional. Argumen utama kategori tersebut adalah adanya kecenderungan terhadap pembentukan suatu kerja sama bidang pertahanan antar negara, dan penekanan terhadap upaya kerja sama industri pertahanan regional. Kerja sama tersebut menjadi kunci kesuksesan untuk membangun suatu regionalisme, merupakan bentuk dari upaya *confidence building*, serta untuk membangun “self-sustainment” dalam pertahanan keamanan dan ekonomi regional (Tan, 2012; Wyatt, 2018). Pendapat lain dalam kategorisasi ini mengatakan bahwa kerja sama industri pertahanan di ruang lingkup Asia Tenggara, dan kontrol terhadap produksi persenjataan memiliki potensi ekonomi serta keuntungan sendiri bagi militer. Keuntungan tersebut salah satunya berupa penghematan biaya pengeluaran pertahanan (Karp, 1990).

Kategori terakhir adalah menggunakan perspektif Strukturalisme, terutama melihat dari sisi *dependencies* atau ketergantungan. Pada umumnya, terdapat kesamaan pendapat bahwa ada ketergantungan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara besar di luar kawasan yang sudah maju dalam bidang industri pertahanannya. Ketergantungan terhadap industri pertahanan asing dipengaruhi oleh besarnya keinginan untuk melakukan modernisasi alat persenjataan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu solusi yang

ditawarkan untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah dengan membentuk suatu kerangka kerja sama dalam memproduksi persenjataan dan alat pertahanan lain di kawasan (Wattanayagorn, 1995). Walaupun beberapa negara anggota ASEAN sudah memiliki industri pertahanan yang cukup maju di kawasan, akan tetapi ketergantungan tersebut masih terus berlanjut (Bitzinger, 2017).

Dari keseluruhan kajian literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara sejak dekade 1980 hingga dekade 1990 sudah mengalami perkembangan pesat. Walaupun terdapat beberapa hambatan, berakhirnya Perang Dingin tidak meredakan kegiatan pembelian, modernisasi, dan juga pengembangan persenjataan dan alat pertahanan di Asia Tenggara. Beberapa peneliti sebelumnya pun sudah mengakui bahwa dibutuhkan adanya sebuah kerja sama terkait pengembangan bersama dalam industri pertahanan.

Walaupun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara tegas dan spesifik menjelaskan mengenai kerangka kerja sama industri pertahanan ADIC yang sudah terbentuk. Selain itu, kajian-kajian literatur yang sebelumnya belum menjelaskan mengenai perkembangan dan hasil dari kolaborasi industri pertahanan tersebut, dan masih dalam ruang lingkup kepada kerja sama bilateral saja. Terlebih lagi, konsep mengenai pengembangan bersama terkait industri pertahanan masih belum dikenal baik di kawasan. Artikel-artikel penelitian mengenai industri pertahanan di bagian dunia ini sekarang lebih berfokus kepada kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Kekurangan dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kerja

sama antar negara-negara di Asia Tenggara terkait industri pertahanan juga belum menyentuh mengenai hambatan atau kekurangan yang dihadapi. Pembahasan pada umumnya melainkan mengenai urgensi untuk terbentuknya suatu mekanisme kerja sama untuk melakukan produksi bersama. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada hal-hal yang menghambat implementasi ADIC di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lanjut, penelitian ini menggunakan kerangka analisa yang membahas mengenai *Arm Transfer Dependence*.

Kerangka Analisis

Kerangka analisa *Arms Transfer Dependence*, atau bisa disebut sebagai ketergantungan dalam transfer persenjataan, merupakan kerangka analisa yang dapat ditarik akarnya kepada perspektif Strukturalisme dalam Hubungan Internasional. Teori mengenai ketergantungan pada dasarnya merupakan teori yang membahas ketergantungan ekonomi dari suatu negara “pinggiran” dengan negara “inti”. Akan tetapi, kerangka analisa yang digunakan pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan teori ketergantungan ekonomi yang dikemukakan oleh Raul Prebisch dan pemikir-pemikir ekonomi lainnya. *Arms Transfer Dependence* berusaha menjelaskan mengapa terjadi ketergantungan di antara negara-negara yang pada umumnya masuk ke dalam kategori negara dunia ketiga dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang sudah maju. Ketergantungan dalam transfer senjata ini juga menjelaskan mengenai beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari sifat ketergantungan tersebut. Salah satu dampak utamanya terlihat dari kebijakan-kebijakan politik luar

negeri suatu negara terhadap negara lainnya (Kinsella, 1998).

Penjelasan lebih mendalam mengenai *Arm Transfer Dependence* dibutuhkan agar variabel-variabel terkait kerangka analisa ini dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian. David Kinsella melalui artikelnya menjelaskan bahwa ketergantungan dalam transfer persenjataan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dari dimensi militer dan politik suatu negara. Selain itu, baik dari dimensi militer dan politik akan menghasilkan perilaku negara yang berbeda (Kinsella, 1998). Selain itu dalam membahas mengenai ketergantungan suatu negara dalam hal transfer senjata, Kinsella juga mengaitkan kepada perilaku negara-negara dunia ketiga yang bersifat konfliktual. Negara-negara dunia ketiga tersebut pada umumnya merupakan negara-negara penerima senjata dari negara-negara maju. Perilaku konfliktual tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan suatu kawasan (Kinsella, 1999). Kinsella juga menambahkan bahwa ketergantungan yang dialami suatu negara dunia ketiga dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu rendahnya kapasitas produksi senjata domestik, dan konsentrasi sumber senjata dari luar yang tinggi.⁵

Melalui dua indikator tersebut, negara mempunyai dua pilihan, yaitu memproduksi persenjataannya secara mandiri, ataupun melakukan diversifikasi pembelian peralatan militernya untuk mengurangi ketergantungan kepada suatu negara tertentu. Akan tetapi, produksi persenjataan atau alat-alat militer lainnya oleh negara-negara dunia ketiga sulit untuk dilakukan apabila ingin bersaing dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang sudah maju. Kesulitan untuk melakukan produksi lokal membuat

negara-negara dunia ketiga yang industri pertahanannya masih berkembang lebih cenderung untuk melakukan impor (Kinsella, 1998). Kemudian pilihan kedua yaitu diversifikasi, yang akan membuat adanya kendala pada logistik militer negara tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi dari penggunaan kerangka analisa ini adalah pembelian lisensi peralatan militer untuk diproduksi lokal dan produksi bersama lebih sulit untuk dilakukan karena melibatkan transfer teknologi dan pengetahuan produksi senjata dibandingkan membeli peralatan yang sudah jadi.

Selain Kinsella, terdapat penelitian-penelitian lainnya yang menggunakan kerangka analisa terkait ketergantungan terhadap transfer senjata atau industri pertahanan. Yoshinori Nishizaki menggunakan kerangka analisa ketergantungan terhadap transfer persenjataan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN (Nishizaki, 1988). Pembahasan Nishizaki terkait ketergantungan transfer persenjataan di Asia Tenggara, nantinya akan berdampak pada kemampuan untuk melakukan ekspor senjata ke luar negeri.⁶ Selain itu, ketergantungan tersebut juga akan memiliki dampak kepada keputusan negara, yaitu untuk memproduksi senjata dan alat pertahanan secara independen, atau dengan melakukan kerja sama produksi bersama di antara negara anggota ASEAN.

Pandangan lain terkait kerangka analisa ketergantungan dalam transfer senjata dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Panitan Wattanayagorn. Wattanayagorn melalui artikelnya berpendapat bahwa ketergantungan transfer senjata terhadap negara-negara maju mengakibatkan sebuah negara yang mengalami ketergantungan tersebut akan

terus menggunakan kekuatan militernya dalam berbagai hal. Maksud dari pernyataan ini adalah negara tersebut akan cenderung menyalahgunakan militer untuk melawan ancaman internal, memperpanjang masa rezim yang berkuasa, dan hal-hal koersif lainnya (Wattanayagorn, 1995). Singkatnya, perilaku sebuah negara akan mengalami perubahan dan hal tersebut saling berpengaruh dengan sistem politik dan militer negara tersebut.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu pendekatan yang sudah di bidang penelitian ilmu sosial. Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif menggunakan informasi dari data-data yang berisikan kata-kata. Metode kualitatif menjadi membedakan antara metode kuantitatif yang menggunakan data-data yang berisikan angka (Bryman, 2004). Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan informasi dari data-data yang berisikan kata-kata, sehingga membedakan antara metode kuantitatif yang menggunakan data-data yang berisikan angka-angka. Setelah dikumpulkan, peneliti akan melakukan triangulasi untuk menentukan validitas dari data-data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan cara melakukan komparasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti studi pustaka baik dari buku, artikel jurnal terkait, dan berita dari berbagai media online lainnya. Penelitian ini membahas mengenai awal ADIC terbentuk, kemudian statistika yang menunjukkan

perilaku impor dari negara sehingga bisa terlihat mengenai ketergantungan dari negara-negara pengimpor tersebut. Penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Bagian kedua berisi pembahasan mengenai data-data terkait penelitian. Pada bagian ini penulis memasukkan variabel-variabel terkait dengan kerangka analisa yang digunakan. Pada bagian pembahasan, penulisan subbab pertama membahas secara singkat mengenai negara-negara berkekuatan besar di luar kawasan yang memiliki peran di dalam transfer persenjataan global, terutama kepada Asia Tenggara. Kemudian pada subbab kedua, penulis membahas negara-negara anggota ADIC yang berfokus kepada kapabilitas industri pertahanan lokalnya, serta volume persenjataan yang diimpor dari luar kawasan untuk menunjukkan ketergantungannya. Bagian terakhir merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian.

Pembahasan

Pada bagian ini penulis mulai menganalisa mengenai mengapa ADIC sejak pembentukannya hingga saat ini tidak memiliki kemajuan yang pesat, dan membuat produk berupa platform alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alat-peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) bersama di Asia Tenggara. Penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian untuk menjelaskan ketergantungan yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penulis menggunakan indikator-indikator terkait kerangka analisa yang digunakan untuk menjelaskan adanya ketergantungan tersebut. Selain itu, penulis menambahkan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh

negara-negara anggota kerja sama ADIC ini dari negara-negara *major powers* di luar kawasan.

Konsentrasi sumber senjata dari luar yang tinggi

Pembelian alutsista dan alpalhankam oleh negara-negara di Asia Tenggara sangat mengandalkan persediaan dari negara-negara besar luar kawasan. Menurut laporan yang ditulis oleh Siemon T. Wezeman kepada *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), impor peralatan pertahanan dari negara-negara di Asia Tenggara mengandalkan teknologi dari beberapa negara yang memiliki industri yang maju.⁷ Hal tersebut berlangsung sejak Perang Dingin berakhir, dan juga terjadi peningkatan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Negara-negara produsen utama peralatan pertahanan tersebut dibagi menjadi enam, yaitu dari Amerika Serikat, Rusia, China, negara-negara Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang.

Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara yang menduduki peringkat pertama sebagai penyedia persenjataan dan alat pertahanan lain di dunia sejak Perang Dingin hingga saat ini. Keterlibatan Amerika Serikat di dalam transfer alutsista dan alpalhankam di sebagian besar negara di dunia salah satunya dipengaruhi oleh Perang Dingin. Amerika Serikat sebagai bagian dari blok barat meluaskan pengaruhnya melalui transfer persenjataan kepada negara-negara yang menghadapi pemberontakan dari gerakan kiri. Berakhirnya Perang Dingin memposisikan Amerika Serikat sebagai pemenang menjadi nomor satu terkait perdagangan senjata di dunia. Hal tersebut juga didukung dengan kecanggihan

teknologi dari peralatan tempur dan pertahanan yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Kecanggihan teknologi yang ditawarkan serta didukung peralatan yang sudah teruji di berbagai medan pertempuran membuat persenjataan yang diproduksi oleh Amerika Serikat menjadi pangsa pasar industri pertahanan global, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Rusia

Selain Amerika Serikat, Rusia merupakan negara pengekspor persenjataan dan alat pertahanan lain terbesar di dunia. Peran Rusia sebagai salah satu pengekspor alat persenjataan dan alat pertahanan terbesar di dunia menempatkan negara tersebut menjadi posisi kedua setelah Amerika Serikat. Keterlibatan Rusia sebagai negara pengekspor alutsista dan alpalhankam terbesar kedua di dunia berawal sejak Perang Dingin. Salah satu cara untuk meluaskan pengaruh dari blok timur ataupun blok barat adalah melalui transaksi persenjataan, dan kerja sama lainnya di bidang pertahanan. Setelah Perang Dingin berakhir, posisi Uni Soviet sebagai kompetitor utama Amerika Serikat berganti menjadi Rusia. Hal tersebut dikarenakan Rusia sendiri memiliki kapabilitas industri pertahanan yang lebih maju dibandingkan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Selain itu kualitas teknologi yang cukup maju dan tidak terlalu mahal menjadi keunggulan dari persenjataan yang dibuat dan dijual oleh Rusia. Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan persenjataan dari sebagian besar negara di dunia, terutama dari kawasan Asia Tenggara.

China

Sejak Perang Dingin berakhir, China mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia-

Pasifik dan juga Afrika. China merupakan negara *major powers* di Asia secara keseluruhan yang sedang mengalami kebangkitan secara ekonomi. Kebangkitan ekonomi China juga diiringi oleh peningkatan kapabilitas militernya melalui berbagai produksi persenjataan dan peralatan baru yang mutakhir. Peningkatan kualitas aset dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh China pun dianggap dapat menyaingi apa yang dimiliki oleh negara-negara barat sebelumnya, terutama Amerika Serikat.

Negara-negara Eropa

Peran beberapa negara Eropa di dalam transfer senjata di dunia sangat besar. Kawasan Asia Tenggara pun tanpa terkecuali menjadi salah satu klien utama dari beberapa negara Eropa dalam melakukan perdagangan senjatanya. Hubungan perdagangan senjata dan peralatan militer lain antara negara-negara Eropa dengan Asia Tenggara terjadi dikarenakan beberapa hal. Apabila dilihat melalui pendekatan sejarah, beberapa negara di Asia Tenggara pernah menjadi wilayah jajahan dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis. Selain itu adanya kemiripan bentuk organisasi kerja sama regional Uni Eropa dengan ASEAN. ASEAN sendiri dibentuk berdasarkan contoh dari organisasi Uni Eropa yang sudah lebih dulu terbentuk, sehingga memunculkan adanya sebuah kedekatan tersendiri. Selain itu, ASEAN pun merupakan kawasan yang memiliki nilai yang strategis bagi negara-negara Eropa dalam hal ekonomi.

Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia Timur yang merupakan pemain baru

di dalam bidang perdagangan dan industri pertahanan. Penjualan persenjataan dan alat pertahanan oleh Korea Selatan kepada Asia Tenggara mulai meningkat selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut dikarenakan Asia Tenggara sendiri yang merupakan konsumen utama persenjataan dan alat pertahanan lain yang termasuk ke dalam kategori *major weapons*.

Rendahnya kapasitas produksi senjata domestik

Pembahasan di bagian penelitian ini berfokus kepada negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota ADIC, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun keempat negara tersebut sudah membentuk kerangka kerja sama ADIC, akan tetapi pengeluaran pertahanan untuk melakukan impor semakin meningkat setiap tahunnya. Penulis akan membahas secara singkat mengenai industri pertahanan lokal yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ADIC ini. Berkaitan dengan hal tersebut, subbab ini menjelaskan mengenai kategori persenjataan yang diimpor oleh keempat negara tersebut sehingga menyebabkan ketergantungan di sektor industri pertahanannya. Data yang digunakan berupa tabel yang diperoleh dari SIPRI mengenai persentase jumlah impor yang dilakukan baik oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di setiap kategori persenjataan.

Tabel 1. Volume impor senjata utama oleh negara-negara Asia Tenggara, 1999–2018

Values are SIPRI/TIV millions; totals may not add up due to the conventions of rounding.

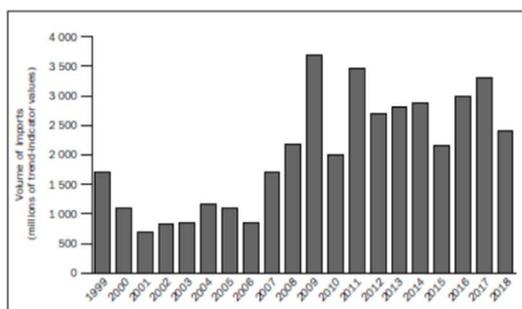
Recipient	1999-2003	2004-08	2009-13	2014-18	Total	% of South East Asia total
Singapore	1 690	2 469	5 013	1 857	11 030	27.2
Viet Nam	348	755	2 384	4 240	7 727	19.1
Indonesia	766	1 010	1 929	3 590	7 295	18.0
Malaysia	1 073	1 566	2 058	728	5 425	13.4
Myanmar	558	776	1 465	872	3 672	9.1
Thailand	652	255	1 011	1 475	3 393	8.4
Philippines	25	96	161	698	981	2.4
Brunei	10	3	332	159	503	1.2
Cambodia	—	70	183	—	252	0.6
Laos	37	10	78	121	246	0.6
Timor-Leste	—	—	32	—	32	0.1
South East Asia total	5 159	7 010	14 645	13 741	40 556	
Global total	100 146	118 492	135 669	146 291	500 598	
South East Asia % of global total	5.2	5.9	10.8	9.4	8.1	

-- nil.

Sumber: SIPRI Military Expenditure Database, Mar. 2019⁸

Data yang diperoleh dari SIPRI diatas menunjukkan pengeluaran militer dari setiap negara di Asia Tenggara. Terlihat bahwa Singapura menduduki posisi paling teratas dengan pengeluaran total sekitar 11,30 milyar USD, dan mencakup sebanyak 27.2 % pengeluaran militer dari seluruh negara di Asia Tenggara. Setelah Singapura, selanjutnya Indonesia menempati posisi ketiga, Malaysia di posisi keempat, dan Thailand kelima. Keempat negara ini merupakan negara-negara yang terlibat di dalam kerja sama ADIC, akan tetapi sejak periode 2009-2013 hingga saat ini terus terjadi peningkatan volume impor. Peningkatan volume tersebut terjadi pada masa setelah ADIC terbentuk.

Tabel 2. Impor senjata utama di Asia Tenggara, 1999–2018



Sumber: SIPRI Military Expenditure Database, Mar. 2019⁹

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat trend peningkatan dari awal dekade 2000 hingga tahun 2009 yang mana volume impor persenjataan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara mencapai tingkat tertinggi. Volume impor tersebut mengalami fluktuasi pasca tahun 2010, akan tetapi terus mengalami peningkatan secara perlahan. Volume impor persenjataan di kawasan Asia Tenggara pasca tahun 2009 menjadi lebih tinggi dibandingkan masa 10 tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan adanya konflik di kawasan Laut China Selatan yang memanas sejak dekade 2010-an karena perluasan pengaruh China di kawasan.

Indonesia

Dalam melakukan produksi persenjataan domestik, Indonesia mengandalkan perusahaan-perusahaan industri pertahanan yang termasuk ke dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan yang termasuk ke dalam BUMN tersebut memiliki spesialisasi dan terbagi menjadi beberapa sektor tersendiri untuk menyediakan alutsista dan alpahlankam bagi tiap matra yang ada di dalam tubuh militer Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik negara tersebut antara lain PT. Pindad (Persero), PT. PAL Indonesia, dan PT. Dirgantara Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam membangun suatu kemandirian pertahanan. Masing-masing dari ketiga perusahaan tersebut memiliki kekhususan tersendiri. PT. Pindad (Persero) dikenal memproduksi persenjataan-persenjataan kelas ringan seperti senapan, pistol, dan persenjataan-persenjataan lain serta dengan amunisinya, hingga kendaraan taktis tempur yang digunakan baik oleh militer ataupun kepolisian. PT. PAL Indonesia sendiri

dikenal memproduksi alutsista dan alpalhankam yang digunakan untuk mempertahankan wilayah maritim Indonesia.

Selain dari ketiga perusahaan tersebut, masih ada perusahaan-perusahaan swasta lain yang ikut turut serta di dalam industri pertahanan Indonesia. Walaupun demikian perusahaan-perusahaan swasta tersebut tidak banyak yang ikut terlibat di dalam produksi alutsista seperti senapan, pesawat, dan kendaraan tempur lapis baja untuk digunakan oleh militer Indonesia. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut melainkan menyediakan berbagai perlengkapan lain yang termasuk ke dalam kategori alpalhankam seperti kendaraan-kendaraan taktis, dan peralatan jenis lainnya. Selain itu, produk-produk buatan berbagai perusahaan swasta tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri. Adanya kecenderungan untuk menekankan peran BUMN di dalam industri pertahanan berdampak kepada kurangnya peralatan canggih generasi baru yang digunakan oleh TNI sebagai militer Indonesia. Selain itu, inovasi yang terjadi di dalam sektor industri pertahanan menjadi berkurang dikarenakan tidak dilibatkannya sebagian besar perusahaan swasta lokal tersebut.

Tabel 3. Pangsa impor senjata utama menurut kategori untuk Indonesia, 1999–2018

Values are percentages, totals may not add up due to the conventions of rounding.

Arms category	1999–2003	2004–2008	2009–13	2014–18	1999–2018
Aircraft	62.1	14.1	57.0	29.5	38.1
Air defence systems	–	0.3	4.3	4.6	3.4
Armoured vehicles	4.7	1.2	2.5	9.8	6.1
Artillery	0.1	0.2	2.0	2.8	1.9
Engines	6.8	8.7	3.5	1.8	3.7
Missiles	0.3	4.5	7.7	7.4	6.3
Naval weapons	1.0	1.1	0.4	1.5	1.1
Sensors	5.7	6.6	4.1	4.8	4.9
Ships	19.3	63.5	17.9	37.5	34.1
Other	–	–	0.7	<0.05	0.2

--=nil

Sumber: SIPRI Military Expenditure Database, Mar. 2019.¹⁰

Melalui data yang diperoleh dari SIPRI diatas, terlihat bahwa sebagian besar kategori alutsista yang diimpor adalah berupa pesawat tempur. Walaupun terdapat penurunan jumlah impor pada periode tahun 2004 hingga 2008 dan tahun 2014 hingga 2018, akan tetapi jumlah tersebut apabila ditotalkan tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Kemudian selain pesawat, kategori persenjataan kedua tertinggi dengan jumlah impor tertinggi berupa jenis kapal tempur. Impor di dalam kategori tersebut juga mengalami fluktuasi, akan tetapi kembali meningkat pada periode 2014-2018. Meningkatnya jumlah impor kapal tempur pada periode tersebut diikuti oleh kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpusat pada keamanan maritim pada masa awal jabatannya.

Ketergantungan dari pembelian alutsista dari negara-negara asing di luar kawasan mempunyai dampak yang buruk secara politik, terutama di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia mengalami embargo oleh Amerika Serikat setelah terjadi peristiwa pembantaian di Santa Cruz di kota Dili, Timor Leste. Dampak dari embargo pun cukup signifikan, salah satunya yang signifikan adalah ketidakmampuan Indonesia untuk membeli peralatan suku cadang, dan modernisasi pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.¹¹ Ketidakmampuan untuk membeli suku cadang pesawat tempur F-16 tersebut juga mengakibatkan pihak angkatan udara harus melakukan kanibalisasi, sehingga berdampak juga kepada menurunnya postur pertahanan udara Indonesia. Selain itu ketergantungan yang terjadi pun dikarenakan kondisi industri pertahanan Indonesia yang masih berkembang, sehingga impor kepada negara-negara *major powers* dari luar kawasan tersebut menjadi sebuah

keharusan agar militer Indonesia tetap kompetitif di kawasan.

Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki wilayah terluas. Letak wilayah negara yang berada di daratan utama benua Asia, dan juga kepulauan menjadikan Malaysia menduduki posisi yang strategis. Wilayah perairan yang mencakup sebagian besar Selat Malaka menjadikan Malaysia sebagai negara yang harus memiliki militer yang kuat untuk menjaga keamanan territorialnya. Industri pertahanan di Malaysia terdiri atas beberapa perusahaan lokal yang cukup maju. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain seperti Syarikat Malaysia Explosive Ordnance Sdn. Bhd. (SMEO) yang pada awalnya dikenal sebagai Syarikat Malaysia Explosive Sdn. Bhd. (SME). SMEO merupakan perusahaan bidang industri pertahanan yang memproduksi berbagai senapan atau *small arms* jenis lain untuk digunakan oleh militer Malaysia.

Kemudian *SME Aerospace* (SMEA) merupakan perusahaan milik Malaysia yang bekerja sama dengan perusahaan BAE Engineering asal Inggris, berfokus kepada pengadaan pesawat tempur.¹² Baik SMEO dan SMEA merupakan anak perusahaan dari *National Aerospace & Defence Industries* (NADI).¹³ Selain itu, perusahaan bidang industri pertahanan yang dimiliki oleh Malaysia salah satunya adalah Deftech Sdn. Bhd yang berfokus kepada berbagai kendaraan darat.¹⁴ Kemudian terdapat perusahaan konsorsium Malaysia Shipyard and Engineering Sdn. Bhd. (MSE) yang berfokus di bidang perkapalan.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan industri pertahanan milik Malaysia tersebut masih belum mampu

untuk melakukan produksi secara mandiri sebagian besar persenjataan beratnya untuk memenuhi kebutuhan dari Malaysian Armed Forces (MAF). Selain itu, perusahaan-perusahaan lokal tersebut dikenal sering melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan dari negara-negara besar di luar kawasan. Sebagai contoh, SMEO melakukan produksi lokal dari senapan M4 Carbine dan Steyr AUG.¹⁵ Senapan M4 Carbine sendiri merupakan produk yang berasal dari Amerika Serikat, dan Steyr AUG sendiri berasal dari Austria. Selain itu, SMEA sebagai perusahaan pertahanan di bidang penerbangan bekerja sama dengan BAE System yang berasal dari Inggris. Adanya kerja sama yang dilakukan dengan berbagai perusahaan dari luar kawasan Asia Tenggara tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah bentuk ketergantungan yang terjadi.

Tabel 4. Pangsa impor senjata utama menurut kategori untuk Malaysia, 1999–2018

Values are percentages, totals may not add up due to the conventions of rounding.

Arms category	1999-2003	2004-2008	2009-13	2014-18	1999-2018
Aircraft	9.0	46.5	20.7	47.8	29.4
Air defence systems	–	4.8	–	1.2	1.5
Armoured vehicles	6.5	7.0	5.5	16.6	7.6
Artillery	3.6	–	0.9	<0.05	1.1
Engines	5.2	1.6	1.3	10.1	3.4
Missiles	9.4	16.0	9.3	3.8	10.5
Naval weapons	0.5	0.4	0.5	–	0.4
Sensors	11.6	4.0	2.5	6.5	5.3
Ships	50.3	20.0	59.2	10.2	39.5
Other	3.6	–	–	3.7	1.2

-- nil

Sumber: SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2019¹⁶

Terkait dengan impor persenjataan dari luar negeri oleh Malaysia, data yang diperoleh dari SIPRI diatas menunjukkan bahwa Malaysia memiliki kecenderungan untuk melakukan impor alutsista berupa kapal tempur. Penekanan terhadap impor kapal tempur tersebut bertujuan agar Malaysia bisa mengamankan wilayah Selat Malaka dari

ancaman-ancaman keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional. Terlihat pada periode tahun 1999-2003 dan tahun 2009 hingga 2013 terdapat peningkatan nilai impor alutsista kategori kapal dengan jumlah yang besar. Berdasarkan informasi dari Businesswire.com, pembelian kapal tempur tersebut dilakukan atas kerja sama antara Malaysia dengan Korea Selatan.¹⁷ Kemudian kategori impor alutsista dengan nilai terbesar kedua adalah jenis pesawat tempur. Impor pesawat yang dilakukan oleh Malaysia dalam hal ini pada umumnya sangat bergantung kepada Amerika Serikat dan Inggris sebagai penyedia utamanya.

Singapura

Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang terlibat di dalam kerja sama ADIC, Singapura walaupun relatif kecil dalam luas wilayahnya merupakan negara yang memiliki industri pertahanan yang lebih maju. Industri pertahanan Singapura saat ini dijalankan oleh perusahaan yang bernama *Singapore Technologies Land Systems Ltd* (STELS) yang dulu dikenal sebagai *ST Kinetics*. STELS sendiri merupakan anak perusahaan dari ST Engineering, yang telah berkontribusi banyak kepada perkembangan berbagai sektor industri di Singapura. STELS telah menghasilkan berbagai produk persenjataan dan alat pertahanan Singapura, dari senapan dengan kaliber 5.56 mm, senapan kelas berat, berbagai amunisi artileri, hingga kendaraan taktis lapis baja. Selain melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri, Singapura juga memasarkan produk industri pertahanannya di pasar global.

Walaupun memiliki kemampuan untuk melakukan produksi *small arms* dan beberapa kendaraan taktis lapis baja,

Singapura masih melakukan impor persenjataan kategori *major weapons* kepada negara-negara besar di luar kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Singapura melakukan pembelian pesawat tempur F-35 dan helikopter serang AH-64 Apache kepada Amerika Serikat.¹⁸ Selain itu Singapura juga mengandalkan pembelian *major weapons* lain kepada negara-negara Eropa, sebagai contohnya tank Leopard II kepada Jerman. Informasi yang didapatkan melalui SIPRI menyatakan bahwa Singapura yang notabene memiliki industri pertahanan yang cukup maju, tetapi masih terdapat kecenderungan untuk melakukan impor. Dalam hal ini Amerika Serikat merupakan negara *major powers* luar kawasan yang menjadi penyedia utamanya. Hal tersebut terlihat dari 54% jumlah persenjataan impornya berasal dari Amerika Serikat.¹⁹

Tabel 5. Pangsa impor senjata utama menurut kategori untuk Singapura, 1999–2018

Values are percentages; totals may not add up due to the conventions of rounding.

Arms category	1999-2003	2004-2008	2009-13	2014-18	1999-2018
Aircraft	50.2	37.0	55.8	46.1	49.1
Air defence systems	3.2	–	0.6	5.9	1.8
Armoured vehicles	0.7	3.2	9.0	11.4	6.8
Artillery	–	–	0.4	–	0.2
Engines	5.7	4.1	2.2	3.4	3.4
Missiles	19.1	4.7	8.1	22.9	11.5
Naval weapons	–	0.4	0.1	2.1	0.5
Sensors	8.2	4.1	7.1	7.2	6.6
Ships	12.9	45.3	15.1	–	19.0
Other	–	1.2	1.6	1.1	1.2

-- nil

Sumber: SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2019²⁰

Apabila melihat tabel diatas, terlihat kategori alutsista utama yang menjadi produk utama yang diimpor oleh Singapura merupakan pesawat tempur. Terdapat fluktuasi jumlah impor sejak tahun 1999 hingga tahun 2018. Kemudian kategori produk alutsista kedua yang cukup sering diimpor oleh Singapura dari tahun ke tahun

adalah berupa kapal. Terlihat dari tabel tersebut jumlah importasi kapal oleh Singapura mengalami peningkatan dari periode 2004 hingga tahun 2008. Tingginya angka tersebut dibandingkan kategori jenis persenjataan yang lain dapat dijelaskan melalui posisi Singapura yang strategis di Selat Malaka. Dikarenakan letak geografis tersebut, Singapura juga memiliki peran untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman keamanan maritim non-tradisional yang berpotensi mengganggu stabilitas di wilayah tersebut. Terlebih lagi Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama terpenting di dunia menjadi target berbagai kasus perompakan kapal, penculikan, serta perdagangan dan penyelundupan barang ilegal lainnya.

Pembelian berbagai alutsista modern kepada beberapa negara-negara barat tersebut didorong oleh beberapa faktor. Singapura memiliki letak geografis yang sangat strategis di Selat Malaka, menjadikan posisinya di jalur dagang tersebut sebagai pemberhentian utama bagi kapal-kapal dagang seluruh dunia. Keuntungan tersebut menjadi terhambat dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat berbanding kecil dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Terlebih lagi luas wilayah yang kecil tersebut membuat Singapura menjadi berkonflik dengan Indonesia terkait sengketa wilayah udara. Adanya beberapa faktor pendorong tersebut membuat Singapura harus memiliki teknologi yang mutakhir di dalam alutsista dan alpalhankamnya, agar militernya bisa tetap kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Perilaku untuk melakukan impor tersebut juga dikarenakan keterbatasan industri pertahanan yang dimiliki oleh Singapura. Industri pertahanan sendiri sangat membutuhkan elemen-elemen sumber daya

alam yang penting seperti besi agar bisa diproses menjadi baja untuk pembuatan alutsista dan alpalhankam. Dikarenakan keterbatasan luas wilayah Singapura, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat diperoleh sendiri.

Posisi Singapura sebagai tempat pemberhentian utama di Selat Malaka bagi kapal-kapal dagang internasional, terutama dari Eropa, menjadi keuntungan tersendiri dalam memperoleh alutsista dan alpalhankam terbaru. Singapura memposisikan dirinya sebagai negara mitra utama dan juga penghubung ASEAN dengan Eropa. Singapura dalam hal ini menjadi negara penerima utama terkait bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada ASEAN, dikarenakan sistem keuangan yang efisien dan maju di kawasan. Adanya hubungan tersebut membuat Singapura menjadi lebih mudah untuk memperoleh peralatan tempur maju seperti tank Leopard 2 buatan Jerman dan pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Adanya suatu bentuk ketergantungan tersebut kemudian berpengaruh kepada sikap Singapura terhadap perkembangan ADIC.

Thailand

Apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota ADIC lainnya, industri pertahanan Thailand masih belum terlalu maju. Thailand sendiri sejak beberapa tahun terakhir sedang berusaha untuk memajukan industri pertahanan lokalnya.²¹ Selain itu, upaya Pemerintah Thailand untuk memajukan industri pertahanannya juga bertujuan agar dapat memenuhi kriteria kebutuhan regional di kawasan Asia Tenggara.²² Salah satu perusahaan pertahanan asal Thailand adalah Chaiseri Metal & Rubber Co., Ltd. yang berfokus kepada produksi dan perawatan berbagai

kendaraan darat militer Royal Thai Armed Forces.²³

Thailand dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan dari Royal Thai Armed Forces dikenal kerap melakukan importasi kepada negara-negara di luar kawasan. Negara *major powers* utama yang menjadi tujuan pembelian alutsista dan alpalhankam yang dimiliki oleh Thailand hingga saat ini adalah Amerika Serikat. Pembelian peralatan tempur tersebut kepada Amerika Serikat sudah dilakukan sejak Perang Vietnam terjadi, dengan tujuan agar Thailand dapat menjaga wilayah perbatasannya pada saat konflik tersebut berlangsung. Hingga saat ini masih terdapat ketergantungan antara Thailand dengan negara-negara luar kawasan. Thailand pun juga mulai menambah jumlah negara tujuan untuk membeli peralatan tempur tersebut.

Tabel 6. Pangsa impor senjata utama menurut kategori untuk Thailand, 1999–2018

Values are percentages, totals may not add up due to the conventions of rounding.

Arms category	1999-2003	2004-2008	2009-13	2014-18	1999-2018
Aircraft	68.0	45.5	50.1	24.7	42.1
Air defence systems	–	–	–	4.1	1.8
Armoured vehicles	2.0	5.1	11.8	27.1	16.0
Artillery	0.8	5.1	3.5	2.2	2.5
Engines	2.1	5.1	5.1	1.6	3.0
Missiles	6.4	6.7	15.0	10.3	10.7
Naval weapons	–	2.0	0.6	1.6	1.0
Sensors	6.3	21.6	2.6	13.6	9.5
Ships	15.0	9.0	11.4	15.0	13.4

--=nil

Sumber: SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2019²⁴

Apabila dilihat melalui data yang diperoleh dari SIPRI diatas, dapat diketahui bahwa importasi peralatan tempur yang dilakukan oleh Thailand sebagian besar berupa pesawat tempur. Terdapat fluktuasi jumlah pembelian dari tahun 1999 hingga 2013. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 terdapat penurunan jumlah pembelian

pesawat tempur oleh Thailand. Kategorisasi jenis persenjataan kedua terbanyak yang diimpor oleh Thailand adalah kendaraan lapis baja, seperti tank, dan kendaraan angkut penumpang lapis baja lainnya. Sejak tahun 1999 terlihat adanya peningkatan jumlah impor di dalam kategori tersebut, tanpa adanya penurunan. Data yang sama juga memperlihatkan peningkatan jumlah impor kendaraan lapis baja tertinggi terjadi pada periode 2014 hingga 2018.

Peningkatan jumlah pembelian kendaraan lapis baja yang dilakukan oleh Thailand diikuti oleh bertambahnya negara *major powers* dari luar kawasan yang menjadi penyedia utama. Dalam hal ini, China mulai berperan sebagai negara *major powers* selain Amerika Serikat untuk menyediakan peralatan militer tersebut. Kendaraan tempur yang diimpor oleh China adalah berupa *main battle tank* atau tank tempur utama VT-4, dengan jumlah total 50 buah.²⁵ VT-4 atau dikenal sebagai MBT3000 sendiri merupakan tank tempur utama generasi terbaru yang diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan Norinco. Tank VT-4 juga memiliki teknologi serupa dengan tank Type 99A yang digunakan oleh angkatan bersenjata China, yaitu People's Liberation Army. Selain tank tempur utama, pemerintah Thailand juga melakukan impor kendaraan angkut penumpang lapis baja berupa VN-1 dengan jumlah 38 buah, diikuti dengan peralatan tempur lainnya.²⁶

Pembelian tank tempur utama kepada China tersebut menandakan terdapat perubahan sikap pemerintah Thailand dalam terkait dengan kebijakan luar negerinya untuk melakukan *balancing*. Adanya penyeimbangan dalam hal negara penyedia peralatan tempur tersebut merupakan respon Thailand terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca

terjadinya kudeta militer pada tahun 2014. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pemblokiran tersebut berdasarkan kebijakan “U.S. Foreign Assistance Act”. Kebijakan tersebut melarang Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan kerja sama di bidang keamanan pada negara yang pemerintahannya ditumbangkan melalui kudeta.²⁷ Akan tetapi pasca pengembalian kekuasaan kepada rakyat oleh pihak militer, Thailand mulai kembali bertransaksi dengan kembali Amerika Serikat terkait penyediaan kebutuhan militernya.

Kesimpulan

Melalui penjelasan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terhambat atau gagalnya ADIC untuk membuat suatu platform persenjataan atau alat pertahanan bersama dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang utama dalam hal ini adalah adanya kecenderungan untuk lebih baik membeli peralatan militer dan pertahanannya kepada negara-negara yang lebih maju daripada melakukan produksi bersama. Kecenderungan tersebut muncul akibat adanya ketergantungan untuk melakukan impor terhadap negara-negara maju yang notabene memiliki produk industri pertahanan yang canggih.

Industri pertahanan dari keempat negara anggota ADIC di saat yang sama belum memiliki kapabilitas untuk menciptakan alutsista dan alpalhankam dengan teknologi canggih tanpa adanya bantuan berupa kerja sama. Sebagai contoh walaupun Singapura memiliki industri pertahanan yang notabene lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tetapi belum mampu untuk

menciptakan tank ataupun pesawat tempur generasi terbaru dari awal. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari SIPRI sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar kategori persenjataan utama yang diimpor oleh negara-negara anggota ADIC merupakan berjenis pesawat tempur, dan kendaraan lapis baja seperti tank dan kendaraan lapis baja angkut penumpang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Industri pertahanan yang dimiliki oleh negara-negara anggota ADIC tersebut belum memiliki kapabilitas untuk menciptakan sendiri kategori-kategori persenjataan kelas berat tersebut.

Negara-negara anggota ASEAN yang ikut serta di dalam ADIC perlu membentuk dan melaksanakan suatu strategi untuk mengurangi ketergantungan dalam transfer persenjataan atau peralatan militer lainnya. Hal tersebut dikarenakan ADIC itu sendiri dibentuk untuk mengurangi ketergantungan untuk melakukan impor persenjataan dan alat pertahanan lain kepada negara-negara luar kawasan Asia Tenggara. Baik Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand harus bisa meningkatkan kinerjanya di dalam ADIC agar platform persenjataan atau pertahanan bersama bisa dibentuk. Peningkatan kerja sama tersebut dapat dimulai melalui pembuatan alpalhankam seperti kendaraan taktis ringan yang memenuhi kebutuhan dari militer masing-masing negara. Pentingnya keberhasilan kerja sama ini dapat membantu meningkatkan proses integrasi di kawasan Asia Tenggara, serta membuat produk alutsista dan alpalhankam yang diciptakan menjadi kompetitif di pasar global.

Referensi

Buku dan Artikel Jurnal:

- Andersson, J. J. (2015). Submarine Capabilities and Conventional Deterrence in Southeast Asia. *Contemporary Security Policy*, 36(3), pp.473–497.
- Bryman, A., 2004. *Social Research Methods*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
- Bitzinger, R. A., 2004. Chapter 17: Offsets and defense industrialization in Indonesia and Singapore. In: J. Brauer and J. Dunne, ed., *Arms Trade and Economic Development: Theory, Policy, And Cases In Arms Trade Offsets*. London and New York: Routledge, pp.249-263.
- Bitzinger, R. A. (2010). A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisition. *Contemporary Southeast Asia*, 32(1), pp.50-69.
- Bitzinger, R. A. (2013). Revisiting Armaments Production In Southeast Asia: New Dreams, Same Challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), pp.369-394.
- Bitzinger, R. A. (2017). Asian arms industries and impact on military capabilities. *Defence Studies*, 17(3), pp.295-311.
- Heinrich, M. N. (2015). The Eurofighter Typhoon programme: economic and industrial implications of collaborative defence manufacturing. *Defence Studies*, 15(4), pp. 341-360
- Huxley, T. (1994). The ASEAN states' defence policies: Influences and outcomes. *Contemporary Security Policy*, 15(2), pp.136-155.
- Karp, A. (1990). Military Procurement and Regional Security in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 11(4), pp.334-362.
- Kinsella, D. (1998). Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict. *Journal of Peace Research*, 35(1), pp.7-23.
- Kinsella, D. (1999). Arms Transfers, Dependence, and Regional Stability: Isolated Effects or General Patterns? *Political Science Faculty Publications and Presentations*. 10.
- Klare, M. (1993). The Next Great Arms Race. *Foreign Affairs*, 72(3), pp.136-152.
- Nishizaki, Y. (1988). A Brief Survey of Arms Production in ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 10(3), pp.269-293.
- Schofield, J. (1998). War and punishment the implication of arms purchases in maritime Southeast Asia. *The Journal of Strategic Studies*, 21(2), pp.75-106.
- Simon, S. (1992) The regionalization of defence in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 5(2), pp.112-124.
- Singh, B. (1993). ASEAN's arms procurements: Challenge of the security Dilemma in the post Cold War Era. *Comparative Strategy*, 12(2), pp.199–223.
- Tan, S. S. (2012). "Talking Their Walk"? The Evolution of Defense Regionalism in Southeast Asia. *Asian Security*, 8(3), pp.232–250.
- Wang, Y. (2013). Determinants of southeast asian military spending in the post-cold war era: a dynamic panel analysis. *Defence and Peace Economics*, 24(1), pp.73–87.
- Wattanayagorn, P. (1995). ASEAN's arms modernization and arms transfers dependence. *The Pacific Review*, 8(3), pp.494-507.
- Wyatt, A. and Galliot, J. (2018). Closing the Capability Gap: ASEAN Military Modernization during the Dawn of

Autonomous Weapon Systems. *Asian Security*, 16(1), pp.53-7
Wezeman, S. (2019). *Arms flows to South East Asia*. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Media Online

About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm.html>, diakses tanggal 20 Maret 2020

ASEAN Defence Ministers' Meeting: Concept Paper on Establishing ASEAN Defence Industry Collaboration, <https://admm.asean.org/dmdocument/s/12.%20ANNEX%2010-%20Concept%20Paper%20on%20Establishing%20ADIC.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2020

Babak Baru F-16 ala Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/07000081/babak-baru-f-16-ala-indonesia?page=all>, diakses tanggal 3 Juni 2020

Balakrishnan, K., & Bitzinger, R. A. (2012). ASEAN Defence Industrial Collaboration: Getting to Yes. *RSIS Commentaries*.

SME Aerospace, <http://www.smea.com.my/v1/about-us/>, diakses tanggal 7 Juni 2020

National Aerospace & Defence Industries, <http://www.nadimalaysia.com/about.html>, diakses tanggal 7 Juni 2020

DRB-HICOM Defence Technologies Sdn Bhd (DEFTECH), <https://www.deftech.com.my/corporate>, diakses tanggal 8 Juni 2020

SME Ordnance, <http://www.smeordnance.com.my/>, diakses tanggal 8 Juni 2020

The Future of the Malaysian Defense

Industry to 2024 - Malaysia's Defense Budget for 2019 is \$3.4 Billion, which Decreased from \$4.6 Billion in 2015 - ResearchAndMarkets.com, <https://www.businesswire.com/news/home/20190322005148/en/Future-Malaysian-Defense-Industry-2024---Malaysias>, diakses tanggal 10 Juni 2020

Singapore To Establish Permanent Guam Detachment, <https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2019-12-23/singapore-establish-permanent-guam-detachment>, diakses tanggal 30 Juni 2020

Thailand Defense Industry Ambition in the Headlines With Technology Transfer Prioritization, <https://thediplomat.com/2019/11/thailand-defense-industry-ambition-in-the-headlines-with-technology-transfer-prioritization/>, diakses tanggal 4 Juli 2020

Thailand plans new 'defence industry estate's, <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/thailand-plans-new-defence-industry-estate>, diakses tanggal 4 Juli 2020

Chaiyasi, http://chaiseri-defense.com/index.php/about_us/index/expetise, diakses tanggal 5 Juli 2020

Thailand Gets More Tanks, Armored Vehicles from China, <https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-china-12052019171249.html>, diakses tanggal 6 Juli 2020

Catatan:

- ¹ About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm.html>, diakses tanggal 20 Maret 2020
- ² ASEAN Defence Ministers' Meeting: Concept Paper on Establishing ASEAN Defence Industry Collaboration, <https://admm.asean.org/dmdocuments/12.%20ANNEX%2010-%20Concept%20Paper%20on%20Establishing%20ADIC.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2020
- ³ Heinrich, M. N. (2015). The Eurofighter Typhoon programme: economic and industrial implications of collaborative defence manufacturing. *Defence Studies*, 15(4), p. 341
- ⁴ Balakrishnan, K., & Bitzinger, R. A. (2012). ASEAN Defence Industrial Collaboration: Getting to Yes. *RSIS Commentaries*.
- ⁵ Kinsella, D. (1998). Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict. *Journal of Peace Research*, 35(1), p. 10
- ⁶ Nishizaki, Y. (1988). A Brief Survey of Arms Production in ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 10(3), p. 276
- ⁷ Wezeman, S. (2019). Arms flows to South East Asia. *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, p. 11
- ⁸ Ibid, p. 12
- ⁹ Ibid, p. 13
- ¹⁰ Ibid, p. 22
- ¹¹ Babak Baru F-16 ala Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/07000081/babak-baru-f-16-ala-indonesia?page=all>, diakses tanggal 3 Juni 2020
- ¹² SME Aerospace, <http://www.smea.com.my/v1/about-us/>, diakses tanggal 7 Juni 2020
- ¹³ National Aerospace & Defence Industries, <http://www.nadimalaysia.com/about.html>, diakses tanggal 7 Juni 2020
- ¹⁴ DRB-HICOM Defence Technologies Sdn Bhd (DEFTECH), <https://www.deftech.com.my/corporate>, diakses tanggal 8 Juni 2020
- ¹⁵ SME Ordnance, <http://www.smeordnance.com.my/>, diakses tanggal 8 Juni 2020
- ¹⁶ Wezeman, Op.Cit., p. 29
- ¹⁷ The Future of the Malaysian Defense Industry to 2024 - Malaysia's Defense Budget for 2019 is \$3.4 Billion, which Decreased from \$4.6 Billion in 2015 - ResearchAndMarkets.com, <https://www.businesswire.com/news/home/2019032005148/en/Future-Malaysian-Defense-Industry-2024---Malaysia>, diakses tanggal 10 Juni 2020
- ¹⁸ Singapore To Establish Permanent Guam Detachment, <https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2019-12-23/singapore-establish-permanent-guam-detachment>, diakses tanggal 30 Juni 2020
- ¹⁹ Wezeman, Op.Cit., p. 38
- ²⁰ Ibid, p. 36
- ²¹ Thailand Defense Industry Ambition in the Headlines With Technology Transfer Prioritization, <https://thediplomat.com/2019/11/thailand-defense-industry-ambition-in-the-headlines-with-technology-transfer-prioritization/>, diakses tanggal 4 Juli 2020
- ²² Thailand plans new 'defence industry estate's, <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/thailand-plans-new-defence-industry-estate>, diakses tanggal 4 Juli 2020
- ²³ Chaieseri, http://chaiseri-defense.com/index.php/about_us/index/expetise, diakses tanggal, 5 Juli 2020
- ²⁴ Wezeman, Op.Cit., p.40
- ²⁵ Thailand Gets More Tanks, Armored Vehicles from China, <https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-china-12052019171249.html>, diakses tanggal 6 Juli 2020
- ²⁶ Ibid
- ²⁷ Ibid